

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menggunakan Pemilu sebagai sarana siklus pergantian pemimpinnya. Terselenggaranya Pemilihan Umum di Negara Indonesia merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan dari dilaksankannya Pemilihan Umum itu sendiri adalah agar dapat memilih anggota-anggota legislative yang kelak membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik melalui produk-produk hukum seperti kebijakan.

Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum No.1 tahun 2017 Pasal 1 ayat 1, tentang tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota selanjutnya disebut Pemilhan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah wujud bagaimana sistem demokrasi beroperasi di Indonesia pada tingkat lanjut. Pilkada langsung kini menjadi sarana sentral sebagai bentuk eksistensi keterlibatan masyarakat turut serta dalam pembuatan keputusan politik di daerah. Sejak kali pertama dilaksanakan pada 2005, Pilkada langsung berusaha disempurnakan baik

dari sisi pengaturan dan penyelenggaraannya agar lebih berkualitas. Salah satu upayanya adalah bagaimana menciptakan Pilkada dengan angka partisipasi yang tinggi sebagai garansi utama legitimasi disamping faktor kontestasi dan kompetisi yang sehat.

Dalam perkembangannya, Pilkada kemudian bertransformasi menjadi Pilkada Serentak mengikuti dinamika perpolitikan yang terus berkembang. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 9 Desember 2015, hadir sebagai tradisi baru demokrasi di Indonesia, Pilkada Serentak yang memiliki fungsi sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari pilkada serentak sebagaimana substansi didalam Undang-Undang Pilkada. Ketiga tujuan tersebut antara lain, untuk menghasilkan kepemimpinan di daerah yang efektif serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang efisien dan efektif dan terakhir untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan Kepala Daerahnya (Ardiantoro, et.al, 2017). Setiap kali penyelenggaraan Pilkada Serentak, seluruh pihak selalu dihadapkan pada beragam tantangan. Pada penyelenggaraan Pilkada Serentak terakhir, berbagai tantangan tersebut antara lain; kampanye hitam dan penyebaran berita bohong (hoax), fenomena pragmatisme pengajuan kandidat, serta beban kerja Komisi Pemilihan Umum yang besar karena pada saat yang bersamaan harus memverifikasi partai politik peserta Pemilu 2019 (kompas.id, 2018).

Pilkada Serentak 2020 adalah pengalaman pertama kali bagi penyelenggara, Pilkada yang diselenggarakan dalam situasi khusus nonbencana. Pilkada Serentak yang idealnya dilaksanakan pada 9 September 2020 digeser menjadi 9 Desember 2020 setelah melalui banyak diskusi dan pertimbangan. Situasi ini tidak lain karena diakibatkan oleh merebaknya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir diseluruh negara didunia. Dari bulan April hingga pertengahan tahun 2020 jumlah korban yang terinfeksi virus cenderung semakin meningkat. Secara regulatif pemerintah bersama DPR dan KPU pada tanggal 14 April 2020 menyepakati opsi penundaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 dengan mengamandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu. Pada tanggal 4 Mei 2020 keputusan penundaan tersebut kemudian dituangkan pemerintah dalam Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Begitu juga dengan Kota Sibolga, merasakan hal yang sama pada pemilihan umum pada saat pandemi covid-19. Tapi KPUD tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kota Sibolga adalah salah satu kotamadya di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat pulau Sumatra, membujur sepanjang pantai dari Utara ke Selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli.

Berikut, data Pemilih dan yang menggunakan hak pilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Sibolga yang diselenggarakan pada tahun 2015:

Tabel 1.1 Data Pemilih dan Yang Menggunakan Hak Pilih

	Laki-laki	Perempuan	Total
Pemilih	30.276	30.932	63.553
Pengguna Hak Pilih	20.311	23.475	45.724
Partisipasi	67,09%	75,89%	71,95%

Sumber : <https://pilkada2015.kpu.go.id>

Mencermati pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang lalu, salah satu hal menariknya adalah partisipasi masyarakat yang meningkat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Kehadiran atau jumlah pemilih merupakan salah satu indikator penting kepercayaan masyarakat atas proses demokrasi di sebuah negara dan bentuk partisipasi nyata warga atas masa depan bangsanya. Tingginya jumlah suara pemilih juga menandakan masyarakat punya harapan besar terhadap demokrasi. Sebaliknya, jumlah pemilih rendah banyak dikaitkan dengan sikap pemilih apatis yang menandakan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada proses politik di negaranya.

**Tabel 1.2 Hasil Persentasi Partisipasi Pemilih Walikota dan wakil Walikota
Tahun 2020**

KECAMATAN	DPT + DPTb	Pengguna Hak Pilih	% Target	% Capaian	Keterangan
SIBOLGA UTARA	15.605	12.421	77,50	79,60	Tercapai
SIBOLGA KOTA	11.567	9.194	77,50	79,48	Tercapai
SIBOLGA SAMBAS	22.852	18.243	77,50	79,83	Tercapai
SIBOLGA SELATAN	15.105	11.968	77,50	79,23	Tercapai
SE- KOTA SIBOLGA	65.129	51.826	77,50	79,57	Tercapai

Sumber: KPU Kota Sibolga

Di Kota Sibolga, Partisipasi pemilih di Pilkada Sibolga 2020 meningkat tajam dibandingkan Pilkada Sibolga 2015. Berdasarkan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari jumlah DPT Pilkada Sibolga 2020 sebanyak 65.129 suara atau 79,57%. Bila dibandingkan dengan Pilkada Kota Sibolga 2015, partisipasi pemilih hanya 71,95% .

Berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan umum professional,serta mempunyai integritas,kapabilitas,dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”,sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih,jujur,dan adil yang sesuai dengan sprit demokrasi. Selain itu UU tersebut

juga telah menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota atau berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan local yang ada di daerah tersebut.

Agar tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik maka KPU harus memiliki berbagai strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mau memberikan hak suaranya pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Keikutsertaan masyarakat dalam menyukseskan Pelaksanaan pemilihan umum sangat diharapkan, dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan penuh tanggung jawab dalam suksesnya demokrasi di Kota Sibolga.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,penulis mengambil rumusan masalah yaitu,Bagaimana Strategi KPUD kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu: untuk mengetahui bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan peneliti tentang Strategi KPUD Sibolga dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memperbaiki strategi-strategi pada saat pemilihan umum.

3. Masyarakat

Untuk menambah pemahaman masyarakat tentang berpartisipasi dalam setiap demokrasi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

4. Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pada penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Strategi

Menurut Chandler (Salusu 2015 : 6), Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti mentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya untuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi merupakan perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat dicapai menggunakan taktik operasional. Sebuah strategi komunikasi hendaknya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan khalayak sasaran akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut pandangnya, dan bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar dapat dijangkau secara efektif.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan strategi merupakan suatu kerangka perencanaan dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam waktu yang telah ditentukan (Angung Nugroho 2018).

Dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk atau tipe strategi tertentu. Menurut konten dalam Salusu (2008:104) tipe-tipe strategi terdiri dari beberapa tipe:

- a. Strategi organisasi (strategy corporate). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru. .
- b. Strategi program (program strategy) strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tetentu.
- c. Strategi pendukung sumber daya (resources support strategy). Strategi sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- d. Strategi kelembagaan (institutional strategy). Focus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisais untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Pengetian strategi mencerminkan bahwa strategi tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan gerakan, tetapi juga posisi yang dituju, tindakan dan kebijakan yang diperlukan.

2.1.2 Tujuan Strategi

Perumusan strategi adalah proses-proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi organisasi yaitu:

- a. Mengidentifikasi atau memahami lingkungan sekitar perusahaan di masa depan dan menentukan visi misi perusahaan guna tercapainya tujuan bersama.
- b. Melakukan analisis internal dan eksternal perusahaan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan serta peluang dan ancaman di masa yang akan datang yang menghambat tercapainya misi.
- c. Merumuskan dan merencanakan faktor-faktor ukuran keberhasilan key success factors dari strategi yang sudah di buat pada tahap analisis.

- d. Menentukan ukuran tujuan target, mengevaluasi dan memeriksa strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

2.1.3 Tingkatan Strategi

Dengan merujuk pada pandangan dari Schendel dan Charles Hofer, Higgins (Salusu 2006 :101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi, yaitu :

- a. Strategi perusahaan Enterprise strategi yang berhubungan dengan masyarakat, tentunya setiap organisasi berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol.
- b. Strategi perusahaan Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, jadi sering disebut Grand Strategymeliputi bidang yang berkaitan suatu organisasi.
- c. Strategi bisnis Menjelaskan bagaimana merebut pasaran/harga pasar di tengah masyarakat public.

2.1.4 Indikator Strategi

Chandler (dalam Salusu 2015 : 64) untuk mencapai suatu proses pencapaian tujuan dengan baik maka berikut beberapa perencana strategi yang perlu diperhatikan:

- a. Formulasi dan sasaran jangka panjang Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

- b. Pemilihan tindakan Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode diantaranya:
- c. Alokasi sumber daya Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilukada dan panitia ad hoc yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilukada untuk berperan aktif dalam mengsosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan yang akan dikerjakan.

2.1.5 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti (2010:179) Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi . Asumsi yang mendasari demokrasi(dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat,warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi kwputusan politik. Oleh karena itu,yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

Merujuk pendapat Supriyono (2014:39) keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk untuk mempengaruhi

keputusan proses politik berupa pemilihan calon pemimpin. Proses ini merupakan salah satu tahap penting karena akan sangat berpengaruh terhadap model dan kebijakan apa yang akan diambil dan dijalankan oleh pemerintah mendatang. Rakyat sangat berkepentingan untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemimpin yang akan membawa Negara kearah yang lebih baik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga Negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah partisipasi politik pada dasar merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pendapat dari Mirriam Budiardjo (2008:367) Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dengan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian mengenai partisipasi politik diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga Negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga berupa kegiatan yang negative yang bertujuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2.1.6 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Rahman Surbakti (2007 :144) membedakan tipe partisipasi masyarakat kedalam empat macam yaitu:

- a. Partisipasi aktif kegiatan warga Negara yang senantiasa memperlihatkan perilaku tanggap (responsive) terhadap berbagai tahap kebijakan pemerintah atau dengan kata lain ketika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup tinggi maka partisipasi politik dapat dikatakan cenderung aktif.
- b. Partisipasi Militan-Radikal, warga Negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsife) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Partisipasi militant-radikal ini berebeda dengan partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, dalam partisipasi ini cenderung menggunakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dapat dikatakan kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka akan melahirkan militan radikal.
- c. Partisipasi Pasif, kegiatan warga Negara yang menerima/menaati segala kebijakan pemerintah yang dibuat, jadi partisipasi pasif ini cenderung tidak mempersolakan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dapat dikatakan kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaannya terhadap pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

- d. Partisipasi Apatis, seseorang yang tidak ingin tau dengan segala kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, orang yang seperti ini bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan system politik yang yang di keluarkan atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka dapat dikatakan partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatitis).

2.1.7 Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Robert Lane (dalam Rush et al 2000:20) menyebutkan bahwa partisipasi politik memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. Fungsi pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
- b. Fungsi kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.

- c. Fungsi ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.
- d. Fungsi keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam berpartisipasi politik antara lain :

- a. Situasi sosial dan ekonomi

Situasi social dan ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sednagkan situasi ekonomi kedudukam seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kekayaan.

b. Situasi Politik

Situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi actor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

c. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

d. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintah.

e. Partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi- diskusi formal.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik, yaitu dalam bentuk pemberian suara dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih hanya bagian konvensional dari partisipasi politik

2.1.8 Indikator Partisipasi Politik

Ada beberapa Indikator partisipasi politik yaitu :

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

c. Kesadaran Politik

Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan pembangunan.

d. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan publik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan menjadi acuan penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti. Berikut adalah penelitian terdahulu tentang Strategi KPU dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat :

Tabel 2.1

Data Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Sri Lestari , Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018.	Kualitatif	Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dilihat dari tiga indikator strategi yaitu yang pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang tahap ini menunjukkan bahwa sudah adanya kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai, yang kedua tahap pemilihan tindakan pada tahap ini KPU Kabupaten Pinrang sudah berupaya secara maksimal

			<p>melakukan sosialisasi ke beberapa segemen masyarakat dengan berbagi metode yang digunakan, ketiga alokasi sumber daya pada tahap ini terkhusus mengenai relawan demokrasi belum sepenuhnya dikatakan baik karena sebagian dari mereka tidak paham terhadap tugas dan fungsinya tetapi dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka dengan memberikan bimbingan teknis dan briefing meskipun tidak dilakukan secara rutin.</p>
3	<p>ATIEK LESTARI, Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.</p>	Kuantitatif	<p>Tingkat partisipasi politik masyarakat di kabupaten Purworejo tergolong masih rendah. Hal ini diperkuat hasil wawancara mendalam yang sebagian besar kurang berpartisipasi aktif dalam pilgub Jateng 2008. Pemilihan di kabupaten Purworejo sebagian besar tergolong pemilih nasional karena mendasarkan pilihannya kepada pasangan bupati atau cawabup atau atas</p>

			penilaian/pertimbangan tertentu. Dan angka golput di kota ini juga termasuk dalam angka tinggi dikarenakan kurang yakinnya masyarakat terhadap pemerintah.
--	--	--	--

Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Penelitian Ruth Nainggolan (2021) Dengan Judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga dalam Meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Kualitatif, dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan untuk mendapatkan hasil. Peneliti melanjutkan Penelitian Dewi Sri Lestari (2018), berjudul Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di KPUD kota Sibolga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

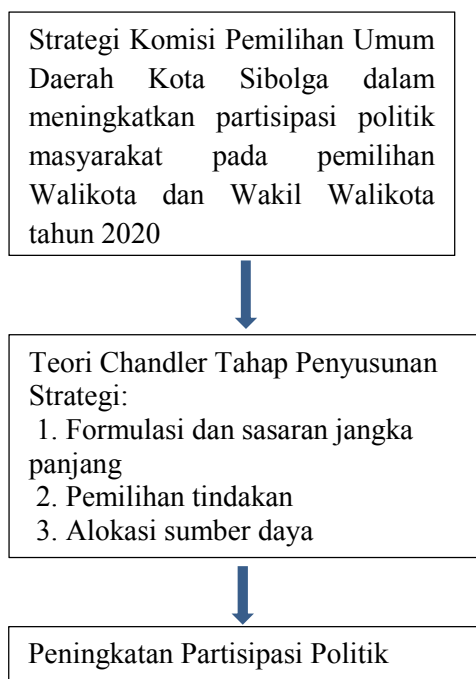
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Pada kerangka berfikir ini juga akan dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisa bentuk strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum Walikota dan wakil walikota tahun 2020.

Adapaun teori yang digunakan pada penelitian menggunakan teori tahapan penyusunan strategi menurut Chandler dalam Salusu (2015:64) ada tiga indikator diantaranya (1) formulasi dan sasaran jangka panjang pada tahap ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan serta tujuan yang akan dicapai (2) Pemilihan tindakan yaitu penentuan tindakan sosialisasi dengan berbagai metode yang digunakan (3) alokasi sumber daya juga mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilukada.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Keterlibatan masyarakat dalam konstelasi pilkada menurut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan kelegitimasian calon kepala daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasaan dalam berdemokrasi. Maka dari upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus terus dilakukan termasuk dalam memfasilitasi penyelenggaraan pilkada.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (Salusu 2015:64) berpendapat terdapat 3 indikator strategi, yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, yang ditandai dengan perencanaan yang mempertimbangkan beberapa aspek penting mengenai kondisi lingkungan. Pemilihan tindakan, ditandai dengan pencapaian visi misi serta tujuan suatu organisasi dan Sumber daya yang ditandai dengan mendukung terlaksananya suatu kegiatan. Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang baik.

Peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan sosialisasi informasi pemilu, melalui media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Metode penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data kelancaran penyusunan penulisan. Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

Menurut Jane Richle (dalam buku Lexy Moleong 2017 : 6) bahwa :

Penelitian kualitatif adalah “upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perpektifnya didalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Peneliti mendeskripsikan bagaimana Strategi KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam memilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota di Sibolga tahun 2020. Peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan Informan di Kota Sibolga.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Jln.S.Parman, No.55 Sibolga. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Komisi Pemilihan

objek/situasi sosial yang diteliti. Oleh sebab itu yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam Hal ini Ketua KPUD Sibolga Bapak Khalid Walid sebagai informan kunci.
2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Afwan Nasution, Anggota KPU Kota Sibolga Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih.
3. Informan Pendukung(Tambahan), yaitu mereka yang dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Informan Tambahan dalam penelitian ini adalah Masyarakat.

3.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan dilakukan melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara:

- a) Metode Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari para informan. Pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan secara lisan kepada informan kunci yaitu ketua KPUD sibolga dan informan utamanta bidang program dan data.

b) Metode Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dan selanjutnya mengadakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ditemukan di lapangan.

- Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Adapun bentuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah:

- a) Penelitian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karangan ilmiah, dan sebagainya.
- b) Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Analisa Data

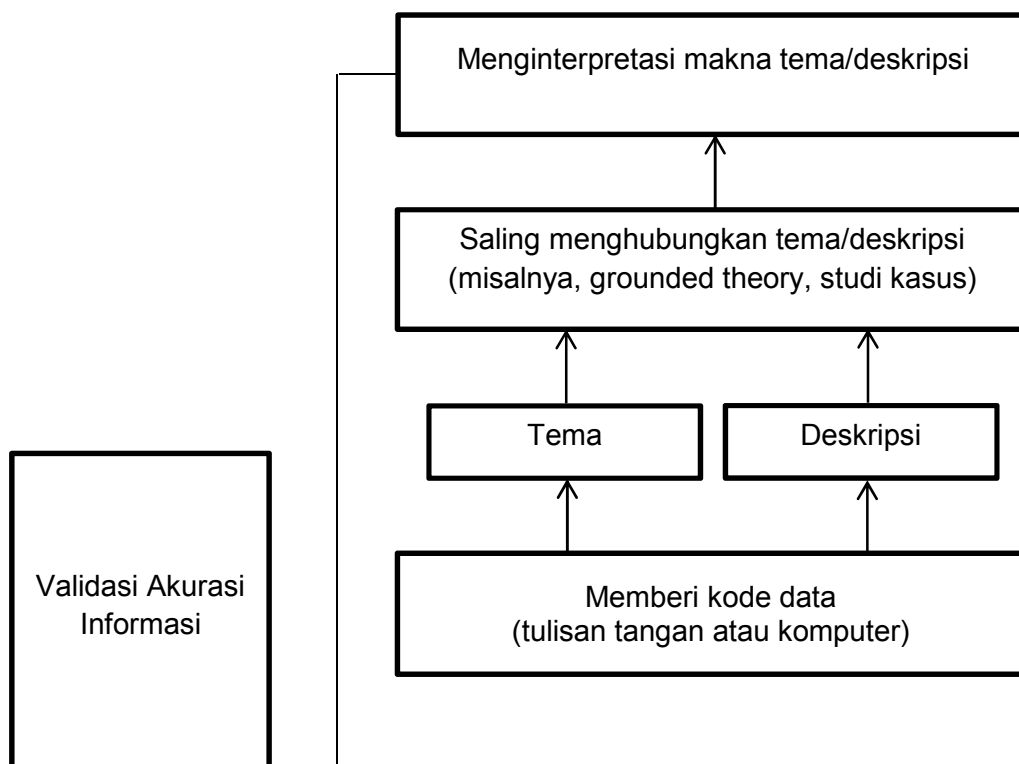
Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Persoalan tersebut bukan menyangkut riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat analisis, dari tingkat analisis yang telah ditetapkan itulah data dapat diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan.

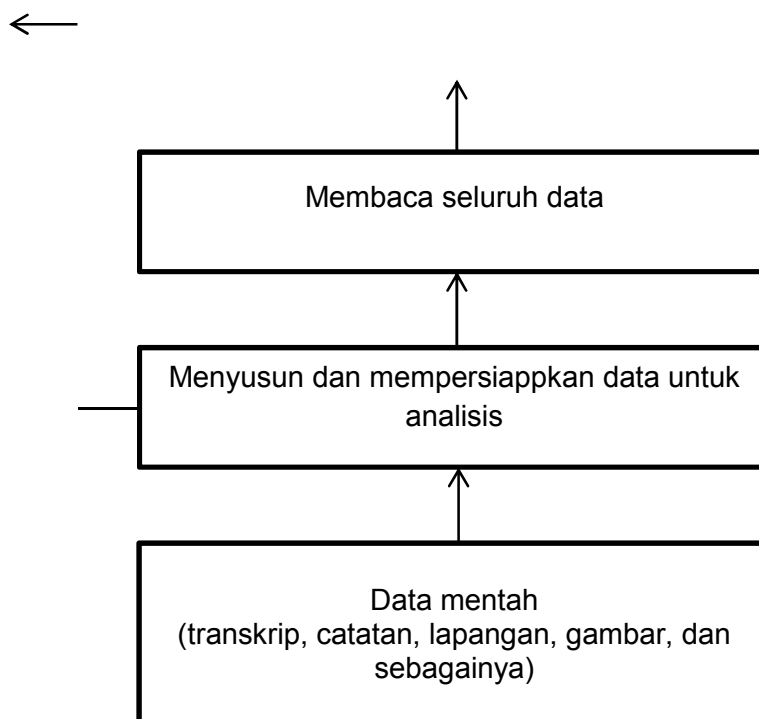
Menurut Creswel (2017 : 263) langkah-langkah teknik analisis data adalah :

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
- b. Membaca keseluruhan data.
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data.

- d. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting orang, kategori dan tema yang akan dianalisis.
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif.
- f. Menganalisis data.

Gambar 3.1 Teknik Analisa Data





Sumber : John W. Creswell (2017 : 263)

Dalam penjelasan gambar diatas penyajian dimulai dari bawah keatas. Dalam praktiknya pendekatan tersebut lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Dari data mentah dilakukan pengolahan data dan mempersiapkan data untuk dapat dianalisis ditempat penelitian yang melibatkan tranoskop wawancara men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis- jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Dalam menyusun dan mempersiapkan data untuk analisis harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Setelah disusunnya dan mempersiapkan data maka harus diteliti kembali, agar tidak adanya kesalahan baik dalam penulisan dan juga dapat memberikan kode dari setiap data – data yang telah disusun agar dengan mudah dipahami kembali oleh peneliti.

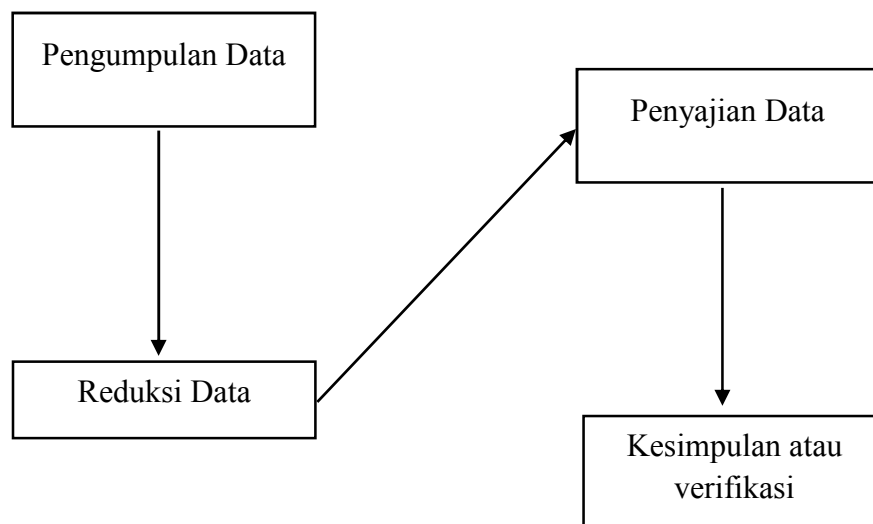
Setelah itu munculnya tema dari penelitian tersebut yang dapat mempermudah dalam mendeskripsikan dan pemaparan data yang saling berhubungan antara tema dan deskripsi teori – teori yang dipaparkan. Dan juga menginterpretasikan makna dari tema/deskripsi tersebut agar tidak adanya kekeliruan dalam pembuatan dan penyajian data dan setelahnya memvalidasi keakuratan informasi sehingga peneliti dapat mengambil makna dari setiap analisis data yang telah dilakukan.

3.6. Analisa Data

Model analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dengan pengumpulan data berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan kemudian data tersebut dikumpulkan untuk diolah secara sistematis.

Komponen dalam analisis data diantaranya yaitu:

1. Pengumpulan Data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan.
3. Penyajian Data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.
4. Penarikan Kesimpulan yaitu hasil akhir dari penelitian yang kebenarannya telah memiliki kebenaran.



Gambar 3.6
Analisa Data

Dari gambar analisis data pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan informasi atau fakta – fakta yang terjadi dilapangan. Kegiatan itu dilaksanakan melibatkan wawancara dengan informan yang ada ditempat penelitian. Setelah itu reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi. Tahap reduksi adalah dimana data informasi dari lapangan kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu dilakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya antara data dengan tujuan penelitian, atau sesuai tidaknya dengan pokok permasalahan. Data yang sudah direduksi tidak akan memberikan makna apa-apa atau tidak memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan

penyajian data dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

Pada penarikan kesimpulan dan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari informasi, data yang ada dan bukan penafsiran menurut pandangan peneliti. Dari analisis data diatas saling terkait dan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri.